

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PENYANDANG TUNAGRAHITA MELALUI BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Miftahul Solikhin

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
solikhinmiftahul@gmail.com

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak untuk hidup sejahtera, termasuk penyandang tunagrahita didalamnya. Kesejahteraan penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pemerintah Desa Karangpatihan berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang tunagrahita berupa pemberdayaan melalui budidaya ikan lele. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses *collaborative governance* dalam upaya pemberdayaan penyandang tunagrahita melalui budidaya ikan lele di Desa Karangpatihan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007:228) yang terdiri dari *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut berdasarkan teori Ansell and Gash sebagai berikut: *Face to face dialogue*, dimana telah dilakukan pertemuan rutin antara Pemerintah Desa Karangpatihan bersama KSM Rumah harapan dan masyarakat, serta terdapat kunjungan-kunjungan dari KPw BI Kediri ke Desa karangpatihan; *Trust building*, yang dilakukan antar *stakeholder* dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang intensif dan melakukan transparansi; *Commitment to the process*, masih terdapat beberapa pengurus KSM Rumah Harapan yang belum maksimal dalam mendampingi penyandang tunagrahita; *Shared understanding* dengan melalui pertemuan atau dialog maupun komunikasi antar *stakeholder*; *Intermediate outcomes*, dengan memastikan bahwa penyandang tunagrahita menguasai cara-cara budidaya ikan lele yang benar agar mampu melaksanakan budidaya ikan lele secara mandiri.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pemberdayaan, Tunagrahita

Abstract

Persons with disabilities who are part of the Indonesian people who also have the right to live in prosperity, including persons with mental retardation therein. Welfare of persons with disabilities are listed in Act No. 8 of 2016. Karangpatihan Village Government seeks the welfare of persons with mental retardation in the form of empowerment through catfish. The aim of the research is to analyze and describe the process of collaborative governance in an effort to empower persons with mental retardation through catfish farming in the village Karangpatihan. This research use descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the study uses the theory of collaborative governance process by Ansell and Gash (2007: 228), which consists of a face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. Data collection through interview, observation and documentation. The data analysis technique used is the technique of data analysis by Miles and Huberman which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study on the terms of the theory of Ansell and Gash as follows: Face-to-face dialogue, which has carried out a routine meeting between the village government Karangpatihan together KSM Home and community expectations, and there are visits from KPW BI karangpatihan Kediri to the village; Trust building, which was conducted between stakeholders by conducting intensive meetings and transparency;

Commitment to the process, there are some board KSM House of Hope is not maximized in assisting persons with mental retardation; Shared understanding through meetings or dialogue or communication among stakeholders; Intermediate outcomes, to ensure that persons with mental retardation to master the ways of catfish farming is right to be able to carry out the catfish farming independently.

Keywords: Collaborative Governance, Empowerment, Mental Retardation

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin yang disebabkan oleh masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4, ragam ragam penyandang disabilitas terbagi menjadi 4 antara lain: Penyandang Disabilitas Fisik, Penyandang Disabilitas Intelektual, Penyandang Disabilitas Mental, Penyandang Disabilitas Sensorik. Penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita ialah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata (Somantri, 2006:103). Tunagrahita ditandai oleh ciri utama kelemahan dalam berfikir atau bernalar. Akibat kelemahan tersebut membuat penyandang tunagrahita memiliki kemampuan belajar dan adaptasi sosial dibawah rata-rata.

Menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas nomor 12 (dua belas) di Indonesia pada tahun 2012. Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki jumlah penyandang disabilitas khususnya tunagrahita yang banyak ialah Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Karangpatihan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Eko Mulyadi, beliau mengatakan bahwa jumlah dari penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan saat ini ada 86 orang. Mayoritas penyandang tunagrahita berada di dusun Tanggungrejo.

Desa Karangpatihan berada di lereng gunung kapur dengan kondisi tanah yang gersang dan tandus. Dengan keadaan seperti ini warga Karangpatihan tidak bisa mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan untuk menggerakkan perekonomian warga. Desa Karangpatihan merupakan desa dengan angka kemiskinan terbesar di Kecamatan Balong. Menurut pengakuan dari Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan, kemiskinan yang dialami oleh warga Karangpatihan merupakan penyebab kurangnya gizi

masyarakat desa tersebut yang berujung pada munculnya fenomena cacat mental atau tunagrahita.

Keterbatasan fisik, kurangnya kemampuan kognitif, dan gangguan mental menjadi alasan penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja walaupun secara usia mereka masih dalam kategori usia produktif. Dengan begitu mereka dipandang sebagai beban keluarga dan juga beban masyarakat oleh lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, dengan kekurangan yang mereka miliki menyebabkan sulitnya mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan dengan dilaksanakannya pemberdayaan terhadap penyandang tunagrahita. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Sumodiningrat (1999:138), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat sendiri memerlukan suatu proses, pengertian pemberdayaan sebagai suatu "proses" menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Sulistiyani, 2004:77).

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan penyandang tunagrahita ialah dengan didirikannya Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit (Pokmas Karangpatihan Bangkit) yang lalu berubah nama menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit (KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit). KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit ini menjadi wadah bagi penyandang tunagrahita untuk mendapatkan pelatihan.

KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit memberikan pelatihan keterampilan hidup (*life skill*) kepada penyandang tunagrahita. Pelatihan tersebut diberikan dengan memanfaatkan kemampuan dari penyandang tunagrahita itu sendiri. Kemampuan tersebut tentunya diasah terlebih dahulu oleh pendamping dikarenakan penyandang tunagrahita sebagian besar belum memiliki kemampuan yang baik dalam mengerjakan sesuatu. Pelatihan yang diterima oleh penyandang tunagrahita salah satunya yakni budidaya ikan lele.

Budidaya ikan lele merupakan kegiatan pemeliharaan pembesaran ikan lele dari yang berukuran kecil (bibit) sampai ukuran konsumsi. Umumnya

kegiatan budidaya ikan lele merupakan alternatif usaha yang coba diperkenalkan pada program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). (Darmansah, dkk, 2016:9)

Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita, diperlukan pelatihan sebelum melakukan budidaya ikan lele tersebut. Penyandang tunagrahita mendapatkan pelatihan dari anggota KSM Rumah Harapan yang berupa kapan mereka harus memberikan makan, seberapa takaran makanan lele yang harus diberikan untuk sekali makan, dan juga perawatan kolam.

Selain pentingnya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi, pembinaan lain yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam program pemberdayaan desa antara lain fasilitas permodalan dan dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi. (Nawang Sari, 2016:14)

Ikan lele yang dibudidaya oleh penyandang tunagrahita tersebut biasanya akan dipanen setelah berusia 3(tiga) bulan. Dalam proses pemanenan tersebut tentunya penyandang tunagrahita didampingi oleh anggota KSM Rumah Harapan bersama warga. Untuk hasil panen sendiri, penyandang tunagrahita mendapatkan hasil Rp.100.000, sampai Rp.200.000.

Untuk bagian penjualan ikan lele hasil budidaya penyandang tunagrahita, Pemerintah Desa Karangpatihan dan KSM Rumah Harapan telah memiliki pengepul khusus yang menjadi tujuan untuk menjual hasil budidaya tersebut. Pengepul tersebut telah lama menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa Karangpatihan untuk menyector hasil budidayanya.

Selain bekerjasama dengan pengepul lele, Pemerintah Desa Karangpatihan juga pernah bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri (KPw BI Kediri). KPw BI Kediri memberikan dana bantuan program bagi Pemerintah Desa Karangpatihan untuk mengembangkan budidaya ikan lele tersebut.

Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam pemberdayaan tunagrahita, maka diperlukan diadakan kolaborasi dari pihak-pihak tersebut. Kolaborasi yang dilaksanakan untuk mempermudah mencapai dari tujuan dari upaya pemberdayaan ini, dikarenakan terdapat suatu keterbatasan baik pendanaan, pengetahuan, dan juga tenaga. Maka disini konsep *collaborative governance* menjadi sangat penting untuk dikaji.

Secara umum dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004;Hartman et al.,2002) (dalam Febrian, 2016:202)

Ansell dan Gash (Sudarmo, 2009:123), membedakan pengertian kolaborasi secara umum bisa dibedakan ke dalam dua pengertian yakni kolaborasi dalam arti proses, dan kolaborasi dalam arti normative. Pengertian kolaborasi dalam arti sebuah proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara

institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi, pemerintah maupun non pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingannya dan tujuannya. Sedangkan dalam pengertian normative merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para partner atau mitranya.

Dari uraian diatas menunjukkan adanya keseriusan terhadap upaya pemberdayaan penyandang tunagrahita melalui budidaya ikan lele. Dengan adanya *collaborative governance* diharapkan seluruh pihak mampu mewujudkan penyandang tunagrahita yang lebih berdaya. Melihat hal-hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses kolaborasi yang dilakukan guna menjalankan pemberdayaan penyandang tunagrahita. Adapun judul penelitian ini ialah “*Collaborative Governance* dalam Upaya Pemberdayaan Tunagrahita Melalui Budidaya Ikan Lele di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah teori proses *Collaborative Governance* oleh Ansell and Gash (2007:228). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis *Collaborative Governance* dalam Upaya Pemberdayaan Tunagrahita Melalui Budidaya Ikan Lele di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori proses *Collaborative Governance* oleh Ansell and Gash (2007:228). Teori tersebut meliputi *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the proses*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

1. *Face to Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Menurut Ansell and Gash, *Collaborative Governance* dibangun melalui dialog atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan (*stakeholders*). Proses dari *Collaborative Governance* berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

Dalam penelitian ini, proses *face to face dialogue* atau dialog tatap muka yang dilakukan oleh para *stakeholder* berupa pertemuan-pertemuan semi formal.

Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan untuk memudahkan komunikasi serta mencapai tujuan bersama dalam pemberdayaan penyandang tunagrahita khususnya pada kegiatan budidaya ikan lele.

Selain memudahkan komunikasi juga sarana dalam membangun kepercayaan antar *stakeholder*. Dimana kepercayaan tersebut yang nantinya akan menjadi fondasi dalam *collaborative governance* ini. Selain itu *face to face dialogue* ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kesalahpahaman. Kesalahpahaman antar *stakeholder* sangat harus diantisipasi, karena kesalahpahaman yang timbul antar *stakeholder* secara langsung atau tidak akan mempengaruhi kepercayaan masing-masing *stakeholder* kepada *stakeholder* yang lain. Jika hal tersebut dibiarkan akan mengancam keberlangsungan dari proses *collaborative governance* dalam upaya pemberdayaan penyandang tunagrahita itu sendiri.

Face to face dialogue yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan dan KSM Rumah Harapan berupa pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali atau setiap setelah proses panen ikan lele. Pertemuan tersebut digunakan sebagai saran saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran untuk kelangsungan budidaya ikan lele. Selain itu dalam pertemuan tersebut juga terdapat pemaparan hasil panen sebagai bentuk transparansi antar pihak dan masyarakat.

Berbeda dengan proses *face to face dialogue* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan dan KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit yang berupa pertemuan rutin semi formal, proses *face to face dialogue* yang dilakukan oleh KPw Bank Indonesia Kediri ialah berupa kunjungan ke Desa Karangpatihan. Dikarenakan peran dan kondisi KPw Bank Indonesia Kediri yang tidak memungkinkan untuk ikut bergabung dalam proses *face to face dialogue* rutin yang dilaksanakan di Desa Karangpatihan.

Dalam *face to face dialogue* peran pengepul lele belum terlihat. Dibuktikannya tidak adanya keterlibatan pengepul ikan lele dalam proses dialog atau pertemuan-pertemuan. Dan dalam dialog ataupun pertemuan lebih didominasi oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab program ini.

2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Menurut Ansell dan Gash, dalam *collaborative governance process* tidak hanya melakukan negosiasi antar aktor, namun lebih kepada membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Karena, kurangnya kepercayaan diantara para *stakeholder* merupakan salah satu penyebab munculnya masalah pada *collaborative governance*. Menurut De Seve dalam Sudarmo (2011:11) dalam ukuran keberhasilan *collaborative governance* salah satunya yaitu adanya rasa saling percaya di antara aktor, di mana rasa saling percaya tersebut didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para aktor mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha aktor lainnya dalam suatu jaringan

untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka bisa percaya terhadap *partner-partner* (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintah (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan *partner-partner* di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama.

Trust building atau membangun kepercayaan di antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada *collaborative governance* dalam upaya pemberdayaan penyandang tunagrahita melalui budidaya ikan lele dilakukan dengan komunikasi serta koordinasi antar pihak-pihak yang terkait. Komunikasi serta koordinasi ini penting dilakukan agar tujuan dalam pemberdayaan penyandang tunagrahita melalui budidaya ikan lele dapat tercapai secara efektif dan efisien. Komunikasi tersebut berlangsung seiring dengan dilakukannya proses *face to face dialogue*.

Selain dengan komunikasi dan koordinasi, *trust building* yang dilakukan oleh para *stakeholder* terutama KPw Bank Indonesia Kediri terhadap Pemerintah Desa Karangpatihan juga dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban atas dana yang diberikan. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban tersebut semakin menguatkan fondasi kepercayaan antara KPw Bank Indonesia Kediri dengan Pemerintah Desa Karangpatihan.

3. Commitment to The Procces (Berkomitmen terhadap Proses)

Dari beberapa rujukan yang telah disimpulkan Ansell dan Gash, tingkat komitmen antar *stakeholder* merupakan penentu dari keberhasilan dan kegagalan *Collaborative Governance*. Dalam sebuah survey pada American and Australian *collaborative groups*, Margerum tahun dalam Ansell dan Gash (2007:559) menemukan bahwa komitmen anggota merupakan faktor paling penting dalam memperlancar *collaborative process*. Komitmen juga berkaitan dengan motivasi bagi para aktor untuk mengimplementasikan *collaborative governance*. Tetapi, menurut Ansell dan Gash, *stakeholder* tidak ingin kepentingan mereka diabaikan atau hanya sekedar mengamankan posisi mereka. Namun, sebaliknya, sesungguhnya komitmen adalah sebuah keyakinan bahwa dengan *collaborative process* akan menciptakan keuntungan untuk masing-masing pihak dan kepentingan publik. Komitmen untuk proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan adalah cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Prosedur yang jelas, adil, dan transparan sangat penting untuk komitmen.

Dalam pelaksanaan *collaborative governance* pada pemberdayaan penyandang tunagrahita melalui budidaya ikan lele tersebut, para *stakeholder* yang terlibat menunjukkan komitmen masing-masing untuk menjalankan *collaborative governance* ini. Pemerintah desa yang memiliki otoritas tertinggi di Desa Karangpatihan mengupayakan adanya

koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* yang jelas melalui pertemuan-pertemuan rutin. Upaya tersebut tentunya dilaksanakan untuk menghadirkan pola kerjasama yang baik dan tidak merugikan satu sama lain.

KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit menunjukkan komitmennya dengan sennatiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah desa sebaik mungkin meskipun mereka melakukannya dengan sukarela tanpa mendapatkan bayaran. Tetapi pada awal dilaksanakannya budidaya ikan lele ada beberapa pengurus KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit yang jarang mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan penyandang tunagrahita karena bertepatan dengan kesibukan masing-masing. Karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan sukarela sehingga tidak ada teguran atau peringatan dari ketua KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit kepada anggotanya.

4. *Shared Understanding* (Berbagi Pemahaman)

Dalam *Collaborative Governance*, para aktor harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. Inilah yang dimaksud *shared understanding* oleh Ansell dan Gash. *Shared understanding* merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Dalam proses *collaborative governance*, harus memiliki pemahaman bersama untuk menjadi tujuan bersama.

Pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya pemberdayaan penyandang tunagrahita melalui budidaya ikan lele proses *shared understanding* sudah berjalan dengan baik. Dimana masing-masing *stakeholder* ini sudah memiliki pemahaman yang selaras. Dimana para *stakeholder* ini memiliki pemahaman yang sama bahwa tujuan dari *collaborative governance* yang dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan penyandang tunagrahita. Kegiatan-kegiatan antar *stakeholder* pun tidak saling tumpang tindih.

Berjalannya proses *shared understanding* ini tidak lepas dari peran proses *face to face dialogue* yang dilakukan oleh para *stakeholder*. Dengan berjalan baiknya *face to face dialogue* yang dilakukan mampu mengantisipasi kesalahpahaman yang berujung perbedaan pandangan. Proses *shared understanding* ini sendiri memudahkan dalam merencanakan langkah apa yang akan diambil oleh para *stakeholder*. Seperti halnya ketika budidaya ikan lele menemui hambatan, dengan kesepakatan yang baik antar *stakeholder* hambatan tersebut mampu diatasi.

5. *Intermediate Outcomes* (Tujuan Jangka Menengah)

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi lebih mungkin untuk terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret dan ketika kolaborasi kemungkinan besar akan berhasil. Meskipun *intermediate outcomes* dapat mewakili output nyata dari hal tersebut, tetapi dalam proses ini

intermediate outcomes diartikan sebagai hasil proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini dapat memberikan *feedback* ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen

Dalam *collaborative governance* ini memiliki *Intermediate outcomes* yaitu memberdayakan penyandang tunagrahita dari segi ekonomi. Dari awal dicanangkannya kegiatan ini memiliki tujuan meningkatkan perekonomian penyandang tunagrahita agar mampu mandiri. Diharapkan hasil dari panen ikan lele menjadi sumber pendapatan tetap bagi penyandang tunagrahita. Selain untuk memberdayakan penyandang tunagrahita dari segi ekonomi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu melatih kemampuan interaksi penyandang tunagrahita dan kemampuan untuk bekerja. Banyak penyandang tunagrahita yang dahulunya hanya diam di rumah sekarang mampu bekerja mengolah sawah ataupun menjadi kuli bangunan.

Upaya pencapaian *intermediate outcomes* dari budidaya ikan lele harus berakhir, dikarenakan program tersebut sudah berakhir. Karena berbagai faktor program tersebut dihentikan dan otomatis menghentikan salahsatu sumber pendapatan penyandang tunagrahita. Diharapkan dengan berhentinya budidaya ikan lele bagi penyandang tunagrahita menjadi momentum bagi para *stakeholder* untuk memperbaiki pola dan jenis kegiatan pemberdayaan dan timbul *collaborative governance* dalam kegiatan yang lain lagi.

Faktor Penghambat Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Tunagrahita melalui Budidaya Ikan Lele

1. Minimnya pengetahuan dan kemampuan penyandang tunagrahita terkait budidaya ikan lele

Budidaya ikan lele pada dasarnya merupakan kegiatan budidaya ikan yang paling mudah. Dengan manajemen dan pengetahuan yang baik terkait budidaya ikan lele akan membawa hasil maksimal. Dengan keterbatasan yang dimiliki penyandang tunagrahita yang minim akan pengetahuan dan kemampuan dalam hal budidaya ikan lele, akan sangat sulit untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal.

2. Komitmen beberapa pengurus KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit

KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit merupakan pihak yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pemberdayaan bagi penyandang tunagrahita. KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit sendiri dibentuk secara sukarela oleh pemerintah desa tanpa mendapat gaji. Diberbagai kesempatan pelatihan ataupun pendampingan pengurus KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit banyak yang tidak hadir dengan alasan kesibukan masing-masing. Dengan tidak maksimalnya komitmen dari pengurus KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit berdampak kepada

efektifitas dan efisiensi pelatihan dan pendampingan yang diberikan.

3. Belum maksimalnya peran swasta

Dalam pelaksanaan budidaya ikan lele oleh penyandang tunagrahita, pengepul lele merupakan satu-satunya pihak swasta yang terlibat. Peran dari pengepul ikan lele itu sendiri hanya sebagai penampung hasil panen ikan lele penyandang tunagrahita dan tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses lainnya, yang seharusnya pengepul lele bisa memberikan masukan terkait budidaya ikan lele yang baik dan benar agar panen ikan lele milik penyandang tunagrahita bisa maksimal dan tidak merugi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai *Collaborative Governance* dalam Upaya Pemberdayaan Tunagrahita Melalui Budidaya Ikan Lele di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Collaborative governance* dalam upaya pemberdayaan penyandang tunagrahita yang melibatkan beberapa *stakeholder* diantaranya Pemerintah Desa Karangpatihan, KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, KPw Bank Indonesia Kediri, beserta tokoh masyarakat Desa Karangpatihan berjalan dengan baik. Dan proses *collaborative governance* para *stakeholder* mampu menjalankan perannya masing-masing, meskipun harus program budidaya ikan lele harus dihentikan.

Dari lima indikator, peneliti menemukan dua indikator yang dipandang masih kurang maksimal, yaitu *face to face dialogue* dan *commitment to the process*. *Face to face dialogue* antar *stakeholder* belum berjalan dengan maksimal, dibuktikan dengan masih mendominasinya pemerintah desa dalam proses pertemuan dan dialog serta belum terlibatnya pengepul lele dalam dialog. Kemudian di *commitment to the process*, masih terdapat beberapa pengurus KSM Rumah Harapan yang memiliki komitmen yang belum maksimal.

Hambatan terbesar yang dihadapi sehingga dihentikannya budidaya ikan lele bagi penyandang tunagrahita ialah belum tepatnya pemilihan kegiatan pemberdayaan bagi penyandang tunagrahita. Budidaya ikan lele dirasa sulit bagi penyandang tunagrahita karena membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran *Collaborative Governance* dalam Upaya Pemberdayaan Tunagrahita Melalui Budidaya Ikan Lele di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai berikut:

1. Membuat jenis kegiatan pemberdayaan yang mudah bagi penyandang tunagrahita namun mampu menghasilkan pendapatan. Tentunya juga disesuaikan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber dana yang ada. Hal tersebut harus diperhatikan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

2. Meningkatkan komitmen dari KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit agar lebih maksimal lagi dalam memberikan pemberdayaan kepada penyandang tunagrahita. Alangkah baiknya mengisi struktur KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit dengan pemuda pemudi yang memiliki semangat dan pemikiran yang berguna bagi pemberdayaan kepada penyandang tunagrahita.
3. Melibatkan pihak-pihak profesional dalam bidang budidaya ikan lele maupun dibidang penanganan penyandang tunagrahita. Keterlibatan pihak-pihak profesional dalam bidang budidaya ikan lele akan membuat pengetahuan penyandang tunagrahita semakin banyak dan tentunya dalam pelaksanaannya didampingi oleh pihak-pihak yang berpengalaman dengan penyandang tunagrahita. Adanya pihak profesional di bidang tunagrahita dalam *collaborative governance* ini akan membuat interaksi dan penanganan penyandang tunagrahita semakin baik.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji.
4. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. dan Deby Febriyan Epriliyanto, S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press.
- Darmansah, Aris, dkk. 2016. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Budidaya Ikan Lele di Desa Balongan, Indramayum Jawa Barat". *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol.2(1): hal. 8-16.
- Febrian, Ranggi Ade. 2016. "Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan". *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. Vol.2(1): hal. 200-208.
- Nawangsari, Ertien Rining. 2016. "Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Menengan Kecil dan Mikro (UMKM) (Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo)". *Journal of Public Sector Innovation*. Vol.1(1): hal. 12-16.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Somantri, Sujihati. 2006. Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sudarmo. 2009. "Elemen-Elemen *Collaborative Leadership* dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapaian Efektivitas *Collaborative Governance*". *Jurnal Spirit Publik*. Vol.5(2): hal. 117-132.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.